



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMAD ARIS SUSANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 516436

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	827.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/80 m2 di KAB / KOTA BANGGAI KEPULAUAN, HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000		
2. Tanah Seluas 389 m2 di KAB / KOTA BANGGAI KEPULAUAN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000		
3. Tanah Seluas 1.200 m2 di KAB / KOTA BANGGAI KEPULAUAN, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
4. Tanah Seluas 1.500 m2 di KAB / KOTA BANGGAI KEPULAUAN, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
5. Bangunan Seluas 64 m2 di KAB / KOTA BANGGAI KEPULAUAN, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	62.000.000
1. MOTOR, HONDA METIK / VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
2. KAPAL LAUT/PERAHU, ISUSU 15PK - Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 52.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	44.512.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	935.512.000



III. HUTANG

Rp. 361.934.551

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 573.577.449

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.